

SKRIPSI

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS HASIL PERKAWINAN ORANG TUA TANA' BULAN DENGAN TANA' KUA-KUA DALAM MASYARAKAT ADAT SA'DAN BALUSU KABUPATEN TORAJA UTARA



**OLEH:
APRILYA PASKALINA WAIR PANGARUNGAN
B11112365**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS
HASIL PERKAWINAN ORANG TUA TANA' BULAN
DENGAN TANA' KUA-KUA DALAM MASYARAKAT ADAT
SA'DAN BALUSU KABUPATEN TORAJA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

**APRILYA PASKALINA WAIR PANGARUNGAN
B11112365**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS HASIL PERKAWINAN
ORANG TUA TANA' BULAN DENGAN TANA' KUA-KUA DALAM
MASYARAKAT ADAT SA'DAN BALUSU KABUPATEN TORAJA
UTARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**APRIYA PASKALINA WAIR PANGARUNGAN
B111 12 365**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 3 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

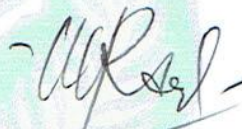
Panitia Ujian :

Ketua,



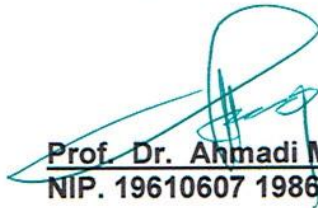
Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP. 19480702 197503 1 001

Sekretaris,



H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H.
NIP. 19530727 198103 1 007

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : **Aprilya Paskalina Wair Pangarungan**
NIM : **B11112365**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Judul : **Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hasil Perkawinan Orang Tua Tana' Bulaan Dengan Tana' Kua-kua Dalam Masyarakat Adat Sa'dan Balusu Kabupaten Toraja Utara.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Mei 2016

Pembimbing I,



Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H.
NIP.19480702 197503 1 001

Pembimbing II,



H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H.
NIP. 19530727 198103 1



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : APRILYA P.W.P
Nomor Pokok : B11112365
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS HASIL PERKAWINAN ORANG TUA TANA' BULAN TANA' KUA-KUA DALAM MASYARAKAT ADAT SA'DAN BALUSU KABUPATEN TORAJA UTARA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

APRILYA PASKALINA WAIR PANGARUNGAN (B11112365), dengan judul **“Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hasil Perkawinan Orang Tua Tana’ Bulaan Dengan Tana’ Kua-kua Dalam Masyarakat Adat Sa’dan Balusu Kabupaten Toraja Utara”**. Di bawah bimbingan Bapak Aminuddin Salle sebagai pembimbing I dan Bapak H. M. Ramli Rahim sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak sebagai ahli waris yang lahir dari hasil perkawinan orang tua Tana’ Bulaan dengan Tana’ kua-kua di kelurahan Balusu Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sa’dan Balusu Kabupaten Toraja Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumen, webside serta pendapat para ahli yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : (1). Perkawinan antara tana’ bulaan dengan tana’ kua-kua dalam masyarakat Sa’dan Balusu pada intinya dilarang, namun pada kenyataannya ada yang menyimpang dari aturan yang telah diatur tersebut. Jika yang menjadi Tana’ bulaan dalam perkawinan seperti itu adalah laki-laki, maka hal ini dimungkinkan terjadi tetapi mereka harus membayar denda adat, sedangkan jika yang menjadi bangsawan dari perkawinan itu adalah perempuan, maka perempuan itu dikenakan hukuman yang dijuluki *Unteka’ Palanduan*, yaitu dengan hukuman pemutusan hubungan dengan keluarganya dan dilakukan upacara *Mangrambu Langi’* (Pengakuan Desa). (2). Kedudukan anak yang lahir dari orang tua yang ayahnya berasal dari *Tana’ Bulaan* dikatakan sebagai *anak Sali*, dia berhak menerima warisan dari orang tuanya dengan syarat bahwa anak Sali harus mengabdikan kepada tongkonan orang tuanya dan mengabdikan pada orang tuanya semasa hidupnya dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak pada waktu orang tuanya meninggal yaitu mengurbankan kerbau dan babi. Dalam menerima warisan *anak Sali* menerima warisan lebih sedikit dari *anak dadian anak tana’* (anak yang lahir dari orang tua yang *tana’* nya sama) atau pembagian ditentukan oleh saudaranya *anak tana’*, sebaliknya jika ibunya yang berasal dari *tana’ bulaan*, maka anak dari hasil perkawinan tersebut hanya akan menerima warisan berupa harta pusaka rendah dan tidak dapat menggunakan maupun menikmati harta pusaka tinggi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui oleh adat mau pun keluarganya.

ABSTRACT

APRILYA PASKALINA WAIR PANGARUNGAN (B11112365), with entitled of “**Child Position as Heir from The Married Parents from Tana’ Bulaan with Tana’ Kua-kua in Indigenous Peoples of Sa’dan Balusu, North Toraja**”. Guided by Aminuddin Salle as the first advisor and H. M. Ramli Rahim as the second advisor.

This research aims to know child position as heir from the married parents from different culture, Tana’ Bulaan with Tana’ Kua-kua in Balusu, North Toraja.

This research was conducted in Sa’dan Balusu, North Toraja. The research used library research and field research method to obtain data. Primary data was obtained from interview and secondary data was obtained from literatures, documents, internet and opinions that connecting with this issue and then analyzed in descriptive.

The results of this research are: (1) Marriage between Tana’ Bulaan with Tana’ Kua-kua according to Sa’dan Balusu people is forbidden, but in reality some people disregard this rule. If the groom from Tana’ Bulaan, it might happen but they must pay custom fine. While if the bride is nobility, is sentenced dubbed *Unteka’ Palanduan*, it means disconnecting with her family and held *Mangrambu Langi’* (village recognition) ceremonial. (2) Child position from Tana’ Bulaan’s father can be said as *Sali* Child, the child have right to get inherited from their parents which requires that *Sali* Child must serve their parent’s *Tongkonan* and have obligation to sacrifice buffalo and pig when their parents die. *Sali* Child receive the inherited less than *dadian anak tana’* child (child from the parents with same *tana’*) or the allotment is determined by *anak tana’*’s brother/sister. Otherwise if their mother from *tana’ bulaan*, the child only will receive low inheritance and can not use or enjoy high inheritance because their parents marriage was not recognized by customary even their family.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih tuntunan dan turut campur tangannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hasil Perkawinan Orang Tua Tana’ Bulaan Dengan Tana’ Kua-kua Dalam Masyarakat Adat Sa’dan Balusu Kabupaten Toraja Utara”**. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian program studi ilmu hukum pada bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini juga, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Frans Wair dan Bertha Pangarungan atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis serta selalu mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan penulis. Demikian pula buat Om Irbar Subanrio Salassa’ serta saudaraku Rannu Marlina Evalin Wair, Febryanto Wair Pangarungan, Winda Olivia Wair Pangarungan, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, terkhususnya dalam mendukung penulis menyelesaikan kuliah.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses tugas akhir ini banyak pihak yang membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II. Dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta merupakan kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dibimbing oleh beliau;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. Selaku Penguji I, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H. selaku Penguji II, dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H, selaku penguji III yang telah memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan dan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menulis skripsi ini;

7. Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh dosen, pegawai, maupun staf civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat serta bantuan lainnya.
9. Masyarakat Kelurahan Balusu yang telah menerima penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Kepada Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, UKM Basket Universitas Hasanuddin, UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin, UKM Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan teman-teman angkatan PETITUM 2012 terima kasih untuk berbagai pengalaman non-akademik yang berkesan dan semoga sukses;
11. Saudara-saudaraku : Gery, Kety, Uki, Arung, Nova, Alen, Nanta, Rena dan Alm. Reny terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Sahabat-sahabatku : Melyanti Tiranda, Pamela Gabriela, Adriyani Masseleng, Riana Pole, Sarlota Masseleng, Linda Astuti yang telah menjadi sahabat penulis selama ini.

13. Teman-teman keluarga *Paraparata* : Ino', Intan, Gita, Vivi, Esy, Santo, Vian, Dikson, Nelson, Aldo, Andy, Jumar, Adit,
14. Teman-teman di PMK FH-UH 2012, Destri, Santo, Esy, Chery, Dian, Fenty, Wiwik, Lota, Winda, Mita, Aldi, Yudi, Rian, Tito', Gio, Fantarari, Bill, Richard. Terima kasih atas bantuan, kerja sama dan kebersamaan yang telah kita lalui selama masa perkuliahan.
15. Seluruh teman-teman KKN Reguler Gelombang 90 Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, khususnya Kiki, Alam, Sri Wahyuni, Uni', Hendrik, Rabiah, Ika, Ippang, Dimas, Ammy, Cia', atas bantuan dan kerja samanya selama menjalani Kuliah Kerja Nyata.
16. Warga Kelurahan Bentenge' Kabupaten Bulukumba yang telah menerima dan membantu penulis selama menjalani proses Kuliah Kerja Nyata, khususnya Pak lurah, Ibu Sekretaris lurah, Kak Tuo, Ima, Dito'.
17. Seluruh pihak-pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun dengan doa yang tidak dapat penulis rincikan satu per satu dalam tulisan ini karena keterbatasan penulis dalam mengingatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis berterima kasih apabila ada kritik ataupun saran dari pembaca demi penyempurnaan

skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi yang membacanya.

Makassar, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Hukum Perkawinan Adat	8
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Adat.....	8
2. Sistem Perkawinan Adat	10
3. Asas-asas Perkawinan Adat	11
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.....	12
5. Perkawinan Dalam Hukum Adat Toraja	18
6. Sistem Kekerabatan Masyarakat Toraja	20
B. Tinjauan Hukum Waris Adat.....	21
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	21
2. Sistem Waris Adat.....	23
3. Sifat Waris Adat	25

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Populasi dan Sampel	29
E. Analisis Data	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 31
A. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara	31
1. Latar Belakang Toraja Utara	31
2. Keadaan Penduduk.....	35
3. Pendidikan	36
4. Agama.....	37
B. Latar Belakang Sa'dan Balusu	37
C. Bagaimana Perkawinan Orang Tua Tana' Bulaan Dengan Tana' Kua-kua Dalam Masyarakat Adat Sa'dan Balusu.....	38
D. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hasil Perkawinan Orang Tua Tana' Bulaan Dengan Tana' Kua- kua Dalam Masyarakat Adat Sa'dan Balusu	42
 BAB V PENUTUP	 49
A. Simpulan	49
B. Saran	51
 DAFTAR ISTILAH	 52
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di dalam negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang diketahui, hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang memiliki daya ikat dan daya paksa untuk mencapai tujuannya yaitu, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan kebiasaan, sehingga kepentingan yang ada pun sangat beragam oleh karena itu dibuatlah hukum yang berguna untuk melindungi kepentingan- kepentingan dan hak-hak setiap warga negara.

Jika melihat pada kondisi negara Indonesia, maka secara otomatis akan tercipta suatu hukum yang timbul dari kebiasaan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksudkan adalah kebiasaan yang lahir dan tumbuh di dalam kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung mengikat dan mengatur tingkah laku tiap-tiap orang yang tunduk pada kebiasaan tersebut yang kemudian dikenal dengan hukum adat.

Walaupun saat ini masyarakat Indonesia sudah mengalami modernisasi yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju berkembang dan dekat dengan teknologi tetapi itu tidak membuat masyarakat Indonesia meninggalkan aturan yang lahir dari kebiasaan mereka. Pada kenyataannya, hingga saat ini di daerah pedesaan masyarakat masih memelihara dan sangat memegang teguh hukum adatnya masing-masing.

Hukum yang lahir, hidup dan berkembang dalam masyarakat itu bagaimana pun kecilnya tetap menjadi pegangan tiap masyarakat yang dipelihara dan dipertahankan. Tiap daerah di dalam Indonesia mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifat yang tersendiri pula, tiap masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing mempunyai cara berpikir yang berbeda-beda dan tersendiri, maka tidak heran jika hukum dalam suatu masyarakat sebagai suatu perwujudan dari cara berpikir masyarakat mempunyai corak dan sifat yang tersendiri pula; dengan perkataan lain hukum masing-masing masyarakat berlain-lainan.

Oleh karena hukum adat yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging tiap-tiap daerah, maka setiap daerah memiliki hukum adatnya sendiri yang berbedah dengan daerah ataupun kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup masalah perkawinan, kekerabatan, kewarisan dan lain-lain. Khusus dalam tugas akhir ini, penulis akan membahas mengenai perkawinan dan kewarisan.

Manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi disini berarti manusia membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya yang sering disebut keluarga.¹ Keluarga dihasilkan dari suatu perkawinan. Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang akan melakukan suatu perkawinan. Aturan-aturan yang mengatur mengenai hubungan hukum tersebut dikenal dengan hukum perkawinan.

Setelah adanya suatu perkawinan maka terbentuklah suatu keluarga baru. Dari perkawinan tersebut diharapkan adanya keturunan baru agar garis keturunan dari keluarga tersebut tidak putus sampai disitu saja. Keturunan baru dari suatu perkawinan disebut anak. Jika suatu saat orang tua dari suatu keluarga mengalami kematian atau meninggal dunia maka harta kekayaannya yang ditinggalkannya akan beralih ke orang lain yang ditinggalkannya. Untuk itu diperlukan adanya aturan-aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang telah meninggal dengan kekayaannya dengan orang yang akan menerima peralihan harta tersebut. Aturan –aturan yang mengatur mengenai hubungan hukum tersebut dikenal dengan hukum waris.

¹ <http://rizqiapriazi.tumblr.com/post/35059998092/tugas-softskill-ilmu-sosial-dasar-manusia-sebagai-makhluk-sosial.html> diakses pada 16 Januari 2016 pukul 09.00 WITA.

Hukum adat sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia, juga mengatur mengenai perkawinan dan waris yang juga dikenal dengan sebutan hukum perkawinan adat dan hukum waris adat. Hukum perkawinan adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.² Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³

Dalam masyarakat adat Toraja, budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya sangat dipegang tegu dan dipertahankan hingga saat ini. Hingga pada perkembangannya saat manusia sudah mengalami perkembangan zaman dan mulai mengenal teknologi dan manusia sudah mengerti tentang hukum positif Indonesia tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah di Toraja yang lebih memilih menjalankan tradisi leluhurnya yang telah diwariskan secara turun temurun baik dalam hal perkawinan maupun kewarisan.

²<http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 09.15 WITA.

³ <https://justice94.wordpress.com/pluralisme-hukum-waris-di-Indonesia.com> diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 09.20 WITA.

Perkawinan dalam masyarakat adat Toraja masih mengenal istilah strata sosial atau dalam sebutan orang Toraja disebut *Tana'*. Strata sosial tersebut akan mempengaruhi kedudukan anak sebagai ahli waris dari hasil perkawinan.

Dalam masyarakat Toraja sejak dari dahulu mengenal beberapa strata sosial (*Tana'*) yang sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan kebudayaan Toraja karena sehubungan dengan lahirnya sendi-sendi kehidupan dan aturan dalam *aluk todolo*, dan *Tana'* tersebut dikenal dalam 4 (empat) susunan atau tingkatan masing-masing, yaitu:⁴

1. Kasta atau *Tana' Bulaan* adalah kasta yang menjabat ketua/pemimpin dan anggota pemerintahan adat umpamanya jabatan *Puang*, *Ma'dika* dan *Sok kong Bayu (Siambe')*
2. Kasta atau *Tana' Bassi* adalah Kasta yang menjabat jabatan pembantu atau anggota pemerintahan adat seperti jabatan-jabatan anak *Patalo*, *To Bara'* dan *To parenge'*.
3. Kasta *Tana' karurung* adalah kasta yang menjabat pembantu pemerintahan adat/serta menjadi petugas/pembina *aluk Todolo* untuk urusan *aluk Patuoan*, *aluk Tananan* yang dinamakan *To Indo'* atau *Indo padang*.

⁴ L.T.Tangdilintin, *Sejarah Kebudayaan Toraja*, Yayasan Lepongan Bulan, Toraja, 1974, hlm 162-163

4. Kasta atau *Tana' kua-kua* adalah kasta yang menjabat jabatan petugas/ pengatur pemakaman atau kematian yang dinamakan *To Mebalun* atau *To Ma'kayo* (orang yang membungkus orang mati) dan juga sebagai pengabdikan kepada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*.

Adanya istilah strata sosial (*Tana'*) dalam perkawinan dan pewarisan dalam masyarakat adat Toraja yang akan mempengaruhi kedudukan anak sebagai ahli waris, menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris hasil perkawinan orang tua *Tana' bulaan* dengan *Tana' kua-kua* dalam masyarakat adat Sa'dan Balusu kabupaten Toraja Utara

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan orang tua *tana' bulaan* dengan *tana' kua-kua* dalam masyarakat adat Sa'dan-Balusu?
2. Bagaimana kedudukan anak sebagai ahli waris hasil perkawinan orang tua *tana' bulaan* dengan *tana' kua-kua* dalam masyarakat adat Sa'dan-Balusu?

C. Tujuan dan kegunaan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkawinan *tana' bulaan* dengan *tana' kua-kua* dalam masyarakat adat Sa'dan Balusu.

2. Untuk mengetahui kedudukan anak sebagai ahli waris hasil perkawinan orang tua tana' bulaan dengan tana' kua-kua dalam masyarakat adat Sa'dan Balusu.

Mengacu pada tujuan diatas, maka penulis berharap tulisan ini dapat berguna untuk :

1. Memberikan informasi kepada semua pihak yang tertarik pada hukum perkawinan dan hukum waris adat Toraja.
2. Digunakan oleh para pembaca dan peneliti lain sebagai bahan literatur dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan kewarisan adat dalam masyarakat adat Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perkawinan

1. Pengertian perkawinan dalam hukum adat

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam peri kehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Pandangan dari beberapa ahli tentang pengertian hukum perkawinan adat yaitu :⁵

Ter Haar

“Perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut”.

Djaren Saragih

“Hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 225.

Hilman Hadikusuma

“Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia”.

Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai “*Rites De Passage*” (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, yang membentuk suatu keluarga baru yang mereka bina sendiri.⁶

Rites De Passage terdiri atas 3 tingkatan, yaitu :

- a. Rites De Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula.
- b. Rites De Marga yaitu upacara perjalanan ke status yang baru.
- c. Rites D’agregation yaitu penerimaan dalam status yang baru.

Hazairin dalam bukunya “rejang” Menguraikan peristiwa perkawinan sebagai tiga (3) buah rentetan perbuatan magis yang bertujuan menjamin :

⁶ <http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html> diakses tanggal 16 januari 2016 pukul 14.00 WITA.

- Ketenangan (koalte)
- Kebahagiaan (wevaart)
- Kesuburan (ruchtbaarheid)

2. Sistem Perkawinan Adat⁷

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam :

a. Sistem Endogami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

b. Sistem Eksogami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.

c. Sistem Eleuthergami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena :

- Nasab (Turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus

⁷ *Ibid.*

keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.

- Musyaharah (Per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

3. Asas-asas perkawinan adat⁸

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- d. Perkawinan adat dapat dilaksanakan seorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri. Kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun

⁸ *Ibid.*

sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua atau keluarga dan kerabat.

- f. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara dua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

4. Bentuk-bentuk perkawinan adat

Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan bentuk bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu :⁹

a. Perkawinan Pinang

Perkawinan pinang adalah perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar. Pada umumnya, pihak yang mengajukan pinangan atau lamaran adalah pihak (keluarga) si pemuda, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seorang tau beberapa orang sebagai utusan itu adalah mereka yang sekerabat dengan pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri.

⁹ Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 224

Bila peminangan atau lamaran itu diterima baik, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan lebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang-kadang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan suku Dayak, beberapa suku Toraja dan suku To Mori).

Akibat pertunangan itu adalah, pertama bahwa satu pihak terikat perjanjian untuk kawin dengan pihak lain tertentu; kedua timbulnya keharusan memberi hadiah-hadiah, jadi bila tidak ada hadiah, maka pertunangan dibatalkan; ketiga perlindungan terhadap si perempuan supaya terhindar dari pergaulan bebas, dan keempat mulai timbulnya pada pergaulan tertentu antara calon menantu laki-laki dengan kedua orang tua dari pihak perempuan.

b. Perkawinan lari bersama

Perkawinan lari bersama adalah perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan pihak orang tua

dan sanak saudara, yang terutama datangny dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.¹⁰

c. Perkawinan bawa lari

Perkawinan bawa lari adalaah berupa lari dengan seorang perempuan yang sudah dtunangkan atau dikawinkan dengan orang lain atau membawa lari perempuan dengan paksaan. Salah satu ukuran yang dapat dijadikan patokan bahwa telah terjadi perkawinan bawa lari (misalnya membawa lari perempuan dengan paksaan), adalah (pada masyarakat lampung) tidak adanya surat tengepik. Apabila si gadis dilarikan dengan tanpa surat tengepik, ini berarti bahwa tidak ada persetujuan dari pihak si gadis. Dengan demikian, di sini telah terjadi perkawinan bawa lari . Hal ini sudah tentu membawa konsekuensi yang sifatnya negatis bagi si gadis maupun keluarganya, demikian juga terhadap si pemuda dengan keluarganya.

Rupanya pada masyarakat Bugis-Makassar, kawin lari atau dalam bahasa daerah disana disebut silariang, merupakan hal yang tidak direstui oleh masyarakat. Mengenai silariang ini, Mattulada menulis bahwa kawin lari, biasanya dilakukan karena berbagai alasan yang antara lain belanja perkawinan yang ditentukan oleh keluarga si gadis terlampau tinggi.

¹⁰ *Ibid.*

Apabila terjadi perkawinan lari, maka oleh pihak keluarga si gadis akan dilakukan pengejaran. Para kerabat si gadis yang melakukan pengejaran pada kedua pelarian itu disebut tomasiri, dan kalau mereka berhasil menemukan kedua pelarian itu, bahwa kemungkinan bahwa laki-laki itu dibunuh.

Untuk menyelesaikan masalah ini (apabila tidak diketemukan oleh pihak keluarga si gadis), maka dalam keadaan bersembunyi, si laki-laki berusaha untuk mencari perlindungan pada seorang terkemuka. Apabila ada kesediaan dari orang tersebut akan mempergunakan kewibawaannya untuk meredakan kemarahan dari kerabat si gadis dan menyarankan mereka untuk menerima kembali kedua calon mempelai baru itu sebagai kerabat. Kalau memang terdapat tanda-tanda bahwa kerabat si gadis mau menerima mereka kembali, maka keluarga si laki-laki akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga si gadis (mattulada, 1976:268).

d. Kawin “baku-piara”

Selain daripada pelamaran dan kawin lari sebagai cara untuk dapat melangsungkan perkawinan, pada masyarakat tertentu (misalnya di Minahasa dan Sangihe Talaud), dikenal perkawinan “baku-piara” (sangihe:Nepapiara). Cara yang ditempuh untuk dapat kawin, adalah dengan cara mendatangi rumah si gadis (yang merupakan calon isteri dan sudah tentu telah ada pendekatan

sebelumnya) dan berdiam bersama atau melakukan hidup bersama (“baku-piara”). Dengan keadaan hidup bersama ini maka mereka oleh masyarakat disana telah dianggap sebagai suami isteri.¹¹

Berdasarkan atas susunan kekerabatan perkawinan dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu :¹²

1) Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal, dibedakan menjadi :

- Perkawinan jujur adalah suatu perkawinan yang dilakukan dengan memberikan jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, sebagai lambang diputuskannya kekeluargaan sang istri dengan orang tua, kerabat dan persekutuanannya.
- Perkawinan mengabdikan adalah perkawinan yang disebabkan karena pihak pria tidak dapat memenuhi syarat-syarat dari pihak wanita . Mas perkawinan dilaksanakan dengan pembayaran perkawinan dihutang atau ditundah. Dengan perkawinan mengabdikan maka pihak pria tidak usah melunasi uang jujur. Pria mengabdikan pada kerabat mertuanya sampai utangnya lunas.
- Perkawinan mengganti adalah perkawinan antara seorang janda dengan saudara laki-laki almarhum suaminya. Bentuk

¹¹ *Ibid.*

¹² <http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html> diakses tanggal 16 Januari pukul 15.00 WITA.

perkawinan ini adalah sebagai akibat adanya anggapan bahwa seorang istri telah dibeli oleh pihak suami dengan membayar uang jujur.

- Perkawinan meneruskan adalah bentuk perkawinan seorang balu (duda) dengan saudara perempuan almarhum istrinya. Perkawinan ini tanpa pembayaran jujur yang baru, karena isteri kedua dianggap meneruskan fungsi dari isteri pertama. Tujuan perkawinan ini yaitu terjalannya keutuhan keluarga (hubungan kekeluargaan) agar kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lalu tetap terpelihara juga untuk menjaga keutuhan harta kekayaan (harta perkawinan)
- Perkawinan bertukar adalah bentuk perkawinan dimana memperbolehkan sistem perkawinan timbal balik. Sehingga pembayaran jujur yang terhutang secara timbal balik seakan-akan dikompensikan, pembayaran jujur bertimbal balik diperhitungkan satu dengan yang lain, sehingga keduanya menjadi hapus. Dalam masyarakat patrilineal dikenal perkawinan yang dilakukan “tanpa pembayaran perkawinan (uang jujur)”.
- Perkawinan ambil anak adalah perkawinan yang dilakukan tanpa pembayaran jujur, yaitu dengan mengangkat si suami sebagai anak laki-laki mereka, sehingga si istri tetap menjadi anggota clan semula.

2) Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Yaitu sistem perkawinan dimana diatur menurut tata tertib garis ibu, sehingga setelah dilangsungkan perkawinan si isteri tetap tinggal di dalam clannya yang matrilineal.

Perkawinan menganut ketentuan eksogami, si suami tetap tinggal dalam clannya sendiri, diperkenankan bergaul dengan kerabat isteri sebagai “urung sumando” atau ipar. Anak-anak yang akan dilahirkan masuk dalam clan ibunya yang matrilineal.

3) Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Yaitu bentuk perkawinan yang mengakibatkan bahwa pihak suami maupun pihak isteri, masing-masing menjadi anggota kerabat dari kedua belah pihak. Demikian juga anak-anaknya yang lahir kelak dan seterusnya.¹³

5. Perkawinan Dalam hukum adat Toraja¹⁴

Perkawinan yang dinamakan *Rampanan Kapa'* di Tana Toraja suatu masalah adat yang paling dimuliakan dan dihormati di Tana Toraja, karena dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya atau tersusunnya adat dan kebudayaan manusia seperti pada suku-suku bangsa lain di Indonesia.

“Dalam perkawinan masyarakat Toraja dikenal adanya tingkatan kasta yang dinamakan *Tana'*. Kata *Tana'* (kasta) di Tana

¹³ *Ibid.*

¹⁴ L.T.Tangdilintin, *Sejarah Kebudayaan Toraja*, Yayasan Lepongan Bulan, Toraja, 1974, hlm 164

Toraja sangat mempengaruhi pertumbuhan masyarakat dan adat kebudayaan Tana Toraja.”

Menurut L.T.Tangdilintin, ada empat macam tingkatan Tana' (kasta) di Tana Toraja yaitu :

- a. *Tana' Bulaan* (bangsawan tinggi)
- b. *Tana' bassi* (bangsawan menengah)
- c. *Tana' karurung* (orang yang merdeka)
- d. *Tana' kua-kua* (hamba)

Dalam perkawinan masyarakat Toraja dipengaruhi oleh strata sosial (*Tana'*) masyarakatnya. Menurut kepercayaan dan wibawa masyarakat Toraja dalam suatu perkawinan harus mempunyai kasta yang sama atau lebih darinya. Sungguh menjadi suatu kebanggaan bagi seseorang yang berkasta rendah dalam hal ini *kaunan* (hambah) apabila mendapat pasangan yang mempunyai kasta tinggi, yaitu seorang puang (bangsawan). Maka sebaliknya bagi kaum keturunan bangsawan yang kawin dengan kaum keturunan hambah akan dikucilkan dalam keluarga bahkan tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga. Namun ada pengecualian bagi laki-laki keturunan bangsawan yang menikah dengan hambahnya ia tetap memperoleh haknya sebagai seorang bangsawan dan kedudukannya dalam keluarga tetap.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

6. Sistem kekerabatan Masyarakat Toraja

Masyarakat Toraja terbagi atas keluarga inti, penanggung jawab keluarga adalah ayah dan diganti anak laki-laki bila meninggal sedangkan ibu hanya mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga. Masyarakat Toraja mengikuti garis keturunan bilateral. Keluarga adalah kelompok sosial dan politik utama dalam suku Toraja. Setiap desa adalah suatu keluarga besar. Setiap tongkonan memiliki nama yang dijadikan sebagai nama desa. Perkawinan dengan sepupu jauh (sepupu keempat dan seterusnya) adalah praktek umum yang memperkuat hubungan kekerabatan. Suku Toraja melarang perkawinan dengan sepupu dekat (sampai dengan sepupu ketiga) kecuali untuk bangsawan, untuk mencegah penyebaran harta.

Hubungan kekerabatan berlangsung secara timbal balik, dalam artian bahwa keluarga besar saling menolong dalam pertanian, berbagi dalam ritual kerbau, dan saling membayar hutang.

Setiap orang menjadi anggota dari keluarga ibu dan ayahnya. Anak, dengan demikian, mewarisi berbagai hal dari ayah dan ibunya, termasuk tanah dan bahkan hutang keluarga. Nama anak diberikan atas dasar kekerabatan, dan biasanya dipilih berdasarkan nama kerabat yang telah meninggal.

Sebelum adanya pemerintahan resmi di Toraja, masing-masing desa melakukan pemerintahannya sendiri. Dalam situasi tertentu, ketika suatu keluarga Toraja tidak bisa menangani masalah mereka sendiri, beberapa desa biasanya membentuk kelompok; kadang-kadang, beberapa desa akan bersatu melawan desa-desa lain. Hubungan antara keluarga diungkapkan melalui darah, perkawinan berbagi rumah leluhur (Tongkonan), secara praktis ditandai oleh pertukaran kerbau dan babi dalam ritual.

B. Tinjauan Hukum Waris adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Soepomo, menyatakan bahwa hukum waris itu :¹⁶

“memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab manusia meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan benda tersebut.

¹⁶ R. Soepomo, “*Bab-bab tentang hukum adat*”, Penerbitan universitas, 1967, hml 72

Iman Sudijat

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Ter Haar¹⁷

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Wiryono Prodjodikoro¹⁸

Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian hukum waris dapat ditarik kesimpulan bahwa :¹⁹

- a. Hukum waris mengacuh kepada pihak pewaris, ahli waris, dan barang (warisan). Pewaris adalah orang yang memiliki harta warisan yang akan diserahkan kepada generasi penerusnya. Ahli waris adalah mereka atau para pihak yang mempunyai hak sebagai penerus dari warisan. Barang waris (warisan) adalah

¹⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm 161

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro , "*Hukum Warisan Di Indonesia*" Sumur Bandung 1976, cetakan kelima, hlm 8.

¹⁹ I gede A.B. Wiranaka, *hukum adat indonesia*, citra aditya bakti, Bandung,2005, hlm 256

segala sesuatu yang akan diserahkan atau diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

- b. Mengenai pewarisan, tidak selalu terkait dengan ada atau tidaknya suatu proses kematian karena peristiwa pewarisan dapat dilaksanakan semasa pewaris masih hidup.
- c. Jiwa yang terkandung dalam hukum waris adat adalah jiwa kekeluargaan, mengingat sasaran kegiatannya adalah penerusan dari generasi ke generasi.
- d. Proses pewarisan berlangsung dari 1 (satu) generasi kepada generasi berikutnya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan pewarisan selalu merujuk kepada pihak yang lebih mudah.

2. Sistem kewarisan adat

Sistem kewarisan dalam garis besar terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Diantara ketiga sistem itu pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.²⁰

a. Sistem kewarisan kolektif

Seorang ahli waris menerima harta warisan secara bulat, utuh, dan tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Status peralihan harta terhadap ahli waris terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai dan menikmati hasil. Pola kewarisan seperti ini cenderung terjadi di daerah Lampung, yaitu pada anak laki-laki tertua, penguasaan tanah *dati* di Ambon, tanah

²⁰ *Ibid.*

kalakeran di Minahasa, harta di Minangkabau, dan lain-lain. Tata cara penggunaan dan pengelolaan harta warisan ditetapkan secara bersamaan melalui musyawara dan mufakat. Kebaikan sistem ini adalah apabila fungsi harta kekayaan itu betul-betul dipergunakan buat kelangsungan hidup keluarga besar untuk sekarang dan masa-masa seterusnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh sampai sejauh mana keterlibatan kerabat dalam mempertahankan sistem ini. Kelemahan sistem ini adalah menumbuhkan cara berpikir yang sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Ada kalanya pimpinan kerabat (di Lampung "*Punyimbang*") mulai tidak berperan).

b. Sistem kewarisan Mayorat

Sistem ini mendekati konsep kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemusatan penguasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Penguasaan ini membawa akibat pemeliharaan dan pengurusan terhadap adik-adik yang lain sampai mentas oleh anak yang tertua. Sistem mayorat ini ada 2 (dua) jenis, yaitu mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Di Lampung yang beradat pepadun, misalnya penguasaan atas harta terletak pada anak laki-laki tertua yang disebut "*anak punyimbang*", sedangkan di daerah Semendo Sumatera selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita tertua yang disebut "*tunggu tubang*" yang

didampingi oleh “*payung jurai*”. Sistem mayorat ini memunculkan salah tafsir, yaitu bahwa seolah-olah penguasaan itu identik dengan kepemilikan dan pengalihan. Dengan demikian, ketidak efektifan pengelolaan oleh anak laki-laki tertua atau perempuan tertua justru menjadi titik lemah dari sistem kewarisan mayorat ini.

c. Sistem kewarisan individual

Hak kepemilikan secara pribadi secara mutlak dan penuh kepada masing-masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan. Cenderung terjadi pada struktur masyarakat parental/bilateral dimana masing-masing ahli waris hak dan kedudukannya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kelemahan sistem ini adalah bahwa akhirnya harta warisan terpecah-pecah dan merenggangnya ikatan kekerabatan yang dapat menimbulkan cara berpikir secara perorangan sehingga tidak jarang menimbulkan perselisihan pribadi.

3. Sifat hukum waris adat

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dan aliran-aliran pikiran komunal dan pemikiran konkrit bangsa Indonesia. Hal inilah yang membedakannya dengan prinsip pewarisan barat dan hukum islam.

Oleh karena itu, hukum waris adat memperlihatkan sifat-sifatnya sebagai berikut :²¹

- a. Tidak mengenal *legitime Portie*, akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak; hak sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Di samping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.
- b. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.
- c. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dapat dibagi-bagi.
- d. Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
- e. Dikenal sistem penggantian waris (*plaatsvervulling*)
- f. Pembagian merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah-tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- g. Anak perempuan, khususnya di Jawa, apabila tidak ada anak laki-laki, maka dapat menutup hak mendapat bagian harta

²¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, Jakarta, PT. Toko Gunung agung, 1967, hlm 163-164.

peninggalan kakek-neneknya dan saudara-saudara orangtuanya.²²

- h. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib dipertahankan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum dari barang-barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.
- i. Di samping dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.

²² C.Dewi Wulansari, *Hukum adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 73.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di daerah Sa'dan-Balusu, kabupaten Toraja Utara. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut pernah terjadi perkawinan antara tana' bulan dengan tana' kua-kua dan juga penulis melihat bahwa kehidupan masyarakat setempat yang memegang teguh dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan adat yang merupakan warisan dari leluhurnya, terutama dalam hal stratifikasi sosial.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada tokoh-tokoh adat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan

Penelitian yang dilaksanakan dengan observasi langsung, dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait langsung dengan masalah yang penulis angkat dalam tugas akhir ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dan bertempat tinggal di daerah Sa'dan-Balusu kabupaten Toraja Utara.

2. Sampel

Sampel dari penelitian ini, terdiri dari :

- a. Narasumber, yaitu Kepala lembang dan tokoh-tokoh adat di daerah Sa'dan-Balusu.

- b. Responden sebanyak 6 orang yaitu masyarakat umum yang mewakili orang yang melangsungkan perkawinan bedah strata di daerah Sa'dan-Balusu.

E. Analisis Data

Dari data primer dan data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh sehingga membentuk deskripsi yang mendukung materi yang penulis angkat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Toraja Utara

1. Latar Belakang Toraja Utara

Provinsi Sulawesi selatan terdiri atas empat suku, yaitu suku Bugis, suku Makassar, Suku Mandar dan suku Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu yang terbesar diantaranya dan masyarakatnya menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, sebagian daratan Luwu dan Sulawesi Barat.

Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, *To riaja*, yang berarti “orang yang berdiam diatas negeri atas” . Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari.

Secara sadar atau tidak sadar, masyarakat Toraja hidup dan tumbuh dalam sebuah tatanan masyarakat yang menganut filosofi “*Tau*” . Filosofi *tau* dibutuhkan sebagai pegangan dan arah menjadi manusia (manusia=“*tau*” dalam bahasa Toraja) sesungguhnya dalam konteks masyarakat Toraja. Filosofi *atau* memiliki empat pilar utama yang mengharuskan setiap masyarakat Toraja untuk menggapainya antara lain : - *Sugi'* (Kaya), - *Barani* (Berani), - *Manarang* (Pintar), - *Kinawa* (Memiliki nilai-nilai luhur, agamis, bijaksana). Keempat pilar diatas tidak dapat

ditafsirkan secara bebas karena memiliki makna yang lebih dalam daripada pemahaman kata secara bebas.

Toraja juga biasa digelar dengan *Tondok Lili'na Lepongan Bulan Tana Matarik Allo* yang arti harfiahnya adalah negeri yang bulat seperti bulan dan matahari.

Menurut L. T. Tangdilintin, nama Tondok lepongan bulan atau Tana Matarik Allo (*Tondok* = Negeri, *Lepongan* = Kesatuan, *Bulan* = Bulan, *Tana* = Negeri, *Matarik* = Bentuk, *Allo* = Matahari) artinya negeri yang bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya sebagai kesatuan yang bulat/utuh bagaikan bentuk bulan dan matahari. Nama *Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo* bersumber dari terbentuknya negeri itu dalam suatu kebulatan dan kesatuan tata masyarakat yang terjadi berdasarkan:²³

1. Suatu negeri yang terbentuk atas adanya persekutuan kebulatan berdasarkan atas suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat Toraja dahulu kala. Kepercayaan ini dikenal dengan *Aluk Todolo* yang bersumber dari negeri *Marinding Banua Puang* yang dikenal dengan aluk *pitung sa'bu pitu ratu' pitung pulo pitu* atau aluk *sanda pitunna/aluk 777* (agama/kepercayaan 777).
2. Suatu negeri yang dibentuk bulat oleh beberapa daerah adat tetapi menggunakan suatu dasar adat dan budaya yang

²³ L.T.Tangdilintin, *Sejarah Kebudayaan Toraja*, Yayasan Lepongan Bulan, Toraja, 1974, hlm 1

terpancar (bersumber dari suatu sumber) bagaikan pancaran sinar bulan dan matahari.

3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagian utara pegunungan sulawesi selatan yang sekarang dikenal dengan suku Toraja.

Menurut L.T. Tangdilintin, daerah adat di Tana Toraja dapat dibedakan menjadi :

1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *puang* dengan daerah adatnya bernama *padang dipuangi* atau daerah adat *kapuangan*. Daerah ini terdiri atas kelompok adat *Tallu Batupapan* dan *Endakan* serta kelompok adat *Tallu Lembangna*.
2. Bagian Timur dan Utara, dikuasai oleh penguasa adat bergelar *Siambe'* dalam jabatan *Toparengnge'*, *sokkong bayu*. Daerahnya dikenal dengan daerah adat *padang Diambe'l* atau daerah adat *Dipakaamberan*. Daerah ini terdiri atas :
 - Kelompok adat *Balimbang Kalua'*
 - Kelompok adat *Basse Sang Tempe'*
 - Kelompok adat *Sa'dan Balusu*
 - Kelompok adat *Seko Rongkong*
3. Bagian Barat, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar *Ma'dika* dengan daerah adatnya *padang dima'dikai*.

Daerah ini terdiri dari kelompok adat *Tokalambunan* dan pelompok adat *Pitu ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga*.

Toraja utara merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten induk Tana Toraja. Terbentuknya kabupaten Toraja Utara merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2008 yang dipariurnakan oleh DPR RI pada tanggal 24 juni 2008. Namun peresmian kabupaten Toraja utara baru berlangsung pada tanggal 31 agustus 2008 bersamaan dengan perayaan ulang tahun Tana Toraja yang ke-761 dan ulang tahun kabupaten Tana Toraja yang ke-51.

Dengan adanya peresmian tersebut, maka Toraja utara kini menjadi kabupaten ke-24 di provinsi Sulawesi Selatan. Setelah diresmikan menjadi kabupaten baru yang beribukota di Rantepao, kemudian ditunjuklah Yohanis Surrik Dalipang sebagai pejabat sementara bupati Toraja Utara. Pada tanggal 31 maret 2011, kabupaten Toraja utara memiliki bupati dan wakil bupati definitif pertama yaitu pasangan SOBAT, Frederik Batti Sorring sebagai Bupati dan Frederik Buntang Rombelayuk sebagai wakil bupati periode 2011-2016, dan Untuk periode 2016-2021 Toraja Utara dipimpin oleh pasangan KABORO', Kalatiku Paembonan sebagai Bupati dan Yosia Rinto Kadang sebagai Wakil bupati yang telah dilantik pada tanggal 30 Maret 2016.

Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao terletak antara 2° – 3° lintang selatan dan 119° – 120° bujur timur, yang berbatasan dengan kabupaten Luwu dan Sulawesi Barat di sebelah utara dan

kabupaten Tana Toraja di sebelah selatan, serta pada sebelah timur dan barat masing-masing berbatasan dengan kabupaten Luwu dan provinsi Sulawesi barat. Jarak kabupaten Toraja Utara dengan ibukota provinsi Sulawesi selatan mencapai 329 km yang melalui kabupaten Tana Toraja, kabupaten Enrekang, kabupaten Sidrap, kota Pare-Pare, kabupaten Barru, kabupaten Pangkep dan kabupaten Maros.

Luas wilayah kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km² yang meliputi 21 kecamatan. Kecamatan Baruppu dan kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas masing-masing 162,17 km² dan 131,72 km² atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah salah modal untuk melaksanakan pembangunan di suatu daerah. Jika penduduk diarahkan atau di bina sebagai tenaga kerja yang efektif maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar nilainya. Sebaliknya apabila penduduk dalam suatu daerah tidak di bina atau diarahkan dengan baik sedangkan laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka peningkatan kesejahteraan penduduk tidak akan merata, maka hal ini akan mengganggu keamanan stabilitas nasional.

Penduduk Toraja Utara berdasarkan hasil sensus akhir 2015 berjumlah 325.095 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 29.609 jiwa yang mendiami kecamatan Rantepao. Kecamatan terpadat berada di kecamatan Rantepao, dengan tingkat

kepadatan mencapai 2.783 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah kecamatan Baruppu dan Awan Rante Karua, yaitu 45 dan 93 jiwa/km².

3. Pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan di Toraja Utara semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan.

Sampai dengan tahun ajaran 2015/2016 tercatat jumlah taman kanak-kanak (TK) 90 buah dengan jumlah murid sebanyak 2.247 jiwa, jumlah sekolah dasar (SD) yang terdiri dari SD Inpres, SD non-Inpres, dan SD swasta sebanyak 188 buah.

Pada tingkat Sekolah menengah pertama (SMP) terdiri dari SMP negeri 40 buah dengan jumlah siswa 10.439 dan SMP swasta 10 buah dengan jumlah siswa 2.247 orang. Pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) terdapat 11 buah yang terdiri dari 7 buah SMA negeri dengan jumlah siswa 3.773 dan 4 buah SMA swasta dengan 1.037 siswa.

Selain itu ada puluh Sekolah menengah Kejuruan (SMK) yang berstatus negeri sebanyak 4 buah dengan 2.168 orang siswa dan SMK swasta sebanyak 18 buah dengan 5.118 siswa. Pada tingkat perguruan

tinggi terdapat 4 buah perguruan tinggi swasta dan 1 perguruan tinggi negeri dengan jumlah siswa masing-masing 3.684 dan 820 orang.

4. Agama

Penduduk kabupaten Toraja Utara mayoritas beragama kristen, baik kristen protestan maupun katolik tapi yang paling banyak adalah kristen protestan. Sebagian masyarakat Toraja khususnya di daerah pelosok masih menganut kepercayaan animisme yang dikenal sebagai *Aluk To dolo*. Kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan setempat diwarnai oleh ajaran kekristenan. Tempat peribadatan agama kristen yang terdiri dari kristen protestan dan katolik pada tahun 2016 masing-masing berjumlah 563 dan 105 unit.

B. Latar Belakang Sa'dan Balusu

Kelurahan Sa'dan Balusu adalah sebuah daerah yang terletak di Sa'dan Balusu kabupaten Toraja Utara. Kelurahan Balusu memiliki luas wilayah 6,5 km² dengan jumlah penduduk 1165 jiwa.

Kelurahan Balusu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kelurahan Sa'dan Uluvalu
- Sebelah Timur : Kelurahan Lili'kira
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tagari
- Sebelah Barat : Kelurahan Palawa'

C. Bagaimana Perkawinan Orang Tua Tana' Bulaan Dengan Tana' Kua-kua Dalam Masyarakat Sa'dan Balusu

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Suatu perkawinan yang terjadi dalam masyarakat ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Perkawinan ideal adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Masyarakat Toraja sejak dahulu dikenal dengan adat istiadat dan budayanya. Masyarakat Toraja dalam budayanya mengenal dan memberlakukan tingkatan sosial dalam masyarakat. Tingkatan sosial dalam masyarakat Toraja dikenal dengan sebutan *Tana'*. Dalam masyarakat Toraja khususnya di kelurahan Sa'dan Balusu, tingkatan sosial (*tana'*) menjadi suatu acuan dalam menjalankan adat istiadat seperti *aluk rambu tuka'* maupun *aluk rambu solo'*.

Dengan adanya suatu tingkatan sosial (*tana'*) maka masing-masing anggota masyarakat dapat menyadari tugasnya serta fungsinya dalam

setiap kegiatan hidup tanpa harus diberitahukan. Masing-masing individu pun akan menyadari kedudukannya dalam masyarakat serta tugas masing-masing baik itu sebagai pemimpin (*tana' bulaan*) maupun sebagai hamba (*tana' kua-kua*).

Tana' bulaan (bangsawan) adalah kasta yang menjabat ketua atau pemimpin dan anggota pemerintahan adat umpamanya jabatan *Puang*, *Ma' dika* dan *Sokkong Bayu (Siambe')*. Bangsawa tinggal di Tongkonan. Gelar bangsawan diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang suatu keluarga. Suatu keluarga disebut keluarga bangsawan karena mereka memiliki filosofi *tau* yaitu Kaya, pintar, berani, memiliki nilai-nilai luhur, agamis dan bijaksana. Gelar bangsawan akan secara otomatis diperoleh ketika seseorang dilahirkan dari keluarga bangsawan dan statusnya tidak akan pernah hilang.

Sedangkan *Tana' kua-kua* (Hamba) adalah kasta yang menjabat jabatan petugas/pengatur pemakaman atau kematian yang dinamakan *To mebalun* atau *To ma'kayo* (orang yang membungkus orang mati) dan juga sebagai pengabdikan kepada *Tana' Bulaan* dan *Tana' Bassi*. Seorang hamba tinggal di gubuk kecil yang dibangun di dekat tongkonan milik tuan mereka. Hamba dapat menikah dengan siapa saja tetapi mereka hanya boleh menikah dengan sesama hamba. Golongan hamba dilarang mengadakan perayaan kematian. Kadang-kadang seseorang menjadi hamba karena terjerat hutang dan membayarnya dengan cara menjadi

hamba. Hamba bisa membeli kebebasan mereka, tetapi anak cucu mereka tetap mewarisi status hamba.

Dalam masyarakat Toraja salah satu upacara adat yang sering dilakukan adalah upacara adat *rambu tuka'* (syukuran). Salah satu bentuk dari *rambu tuka'* yaitu upacara perkawinan atau yang biasa disebut dengan *rampanan kapa'*. *Rampanan Kapa'* dalam masyarakat Toraja khususnya di Sa'dan Balusu merupakan suatu masalah adat yang paling dimuliakan dan dihormati karena dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya atau tersusunnya adat dan kebudayaan manusia seperti pada suku-suku bangsa lain di Indonesia. *Rampanan kapa'* dilakukan atau disahkan oleh pemerintah adat yang dinamakan *Ada'*.

Rampanan kapa' sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat yang berpangkal pada adanya susunan tana' (kasta) karena setiap orang yang dikawinkan menurut adat yang pertama-tama harus diketahui ialah adanya Tana' bagi yang bersangkutan. Hal itu demikian karena Tana' atau susunan tana' itu mempunyai ketentuan-ketentuan nilai hukum yang sudah tentu yang menjamin pula kehidupan dan kelangsungan dari pada perkawinan itu, yang jikalau seseorang bersalah dan terjadi perceraian, maka nilai hukum dari pada tana' itu merupakan rumusan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah Adat.

²⁴Menurut Tandi Matandung salah seorang tokoh adat di Sa'dan Balusu dalam menghadapi suatu perkawinan seseorang yang akan

²⁴ T. Matandung, Wawancara, 5 April 2016

melakukan perkawinan itu perlu diperkenalkan terlebih dahulu kasta (Tana') seseorang itu dengan persaksian dari Tongkonannya yang mendapat pengakuan dari pemerintah adat dimana pria itu berasal. Hal tersebut dilakukan karena menurut adat perkawinan dalam masyarakat Sa'dan Balusu tidak boleh seorang laki-laki atau seorang perempuan dari kasta *tana' bulaan* kawin dengan seorang laki-laki atau perempuan dari kasta *tana' kua-kua*.

Meskipun ada aturan adat yang mengatakan bahwa seseorang dari *tana' bulaan* tidak boleh kawin dengan seseorang dari *tana' kua-kua* tetapi pada kenyataannya terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana di kelurahan Sa'dan Balusu pernah terjadi perkawinan dari seorang laki-laki *tana' bulaan* dengan seorang perempuan dari *tana' kua-kua*.

²⁵Menurut Tandi matandung Saat seorang laki-laki dari *tana' bulaan* akan kawin dengan perempuan dari *tana' kua-kua* maka mereka harus membayar denda yang telah ditetapkan di Sa'dan Balusu berupa 12 ekor kerbau. Setelah mereka membayar denda barulah dapat dikawinkan tetapi denda itu semata-mata hanya agar perempuan dari *tana' kua-kua* tersebut dapat kawin dengan laki-laki dari *tana' bulaan*. Denda itu tidak akan mempengaruhi status dari perempuan tersebut, ia akan tetap dianggap sebagai golongan *tana' kua-kua*.

²⁵ T. Matandung, Wawancara, 5 April 2016

Sedangkan perkawinan seorang perempuan dari tana' bulaan dengan tana' kua-kua tidak pernah terjadi di Sa'dan Balusu. Tetapi Tandi Matandung menjelaskan bahwa "jika di Toraja perkawinan itu terjadi maka akan dikenakan hukuman adat yang dijuluki *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk*, yaitu dengan hukuman pemutusan hubungan dengan keluarganya dan dilakukan upacara *Mangrambu Langi'* (upacara pengakuan desa)." Perkawinan seperti ini sangat jarang ditemui dalam masyarakat Toraja.

D. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Hasil Perkawinan Orang Tua Tana' Bulaan Dengan Tana' Kua-kua Dalam Masyarakat Adat Sa'dan Balusu.

Masyarakat Toraja khususnya Sa'dan Balusu mengenal istilah Warisan yang disebut *Mana'* dalam masyarakat. *Mana'* sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pemilikan menurut adat serta sangat erat dengan kehidupan kemasyarakatan tongkonan. Masalah *mana'* ini selalu bersangkut paut dan saling menunjang dalam hubungan upacara-upacara adat terutama upacara Rambu solo' dan upacara Rambu tuka'. Pada dasarnya *mana'* terbagi atas 2 golongan, yaitu :

1. *Mana'* atau warisan yang berpusat atau bersangkut paut dengan tongkonan (*mana' disiossoi*).
2. *Mana'* atau warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencarian orang tua/harta individu (*mana' ba'gi*)

a. *Mana' disiossoi* (harta pusaka tinggi) atau harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan pemilikannya yang merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi* terbagi atas 2 yaitu :

1). *Mana' kano'koran*(warisan non fisik) artinya warisan berupa kedudukan adat yaitu, yaitu warisan yang berupa jabatan masyarakat yang hanya boleh diwariskan kepada keturunannya.

2). *Mana' barang apa* (warisan fisik) artinya warisan yang berupa warisan benda berupa banua tongkonan layuk (rumah adat), padang rante (tempat para bangsawan melakukan upacara adat), gayang (keris), doke (tombak) dan lain-lain.

Semua harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi-bagi agar keutuhannya tetap dipertahankan demi kepentingan martabat keluarga.

b. *Mana' Ba'gi*

Mana' ba'gi (harta pusaka rendah) yaitu harta yang berasal dari lapisan ayah dan ibu, juga harta pencarian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan pemilikannya menurut hak dan kepentingan ahli warisnya misalnya sawah, emas dan lain-lain.

Warisan hak dan kekuasaan adat bagi masyarakat Sa'dan Balusu adalah warisan bersama dari seluruh keluarga yang berketurunan dari

tongkonan yang berkuasa itu dan tidak ada seorang yang mutlak berkuasa menguasai warisan hak dan kekuasaan adat dari satu tongkonan. Dalam membangun dan mempertahankan hak serta kekuasaan dari tongkonan yang berkuasa seluruh turunannya berkewajiban membangun dan mempertahankan hak dan kekuasaan tersebut dan hal ini menyangkut martabat keturunan dan keluarga.

Kewajiban-kewajiban dalam pengabdian kepada orang tua dalam menerima warisan harta benda orang tua, hal ini diatur oleh ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum kehidupan masyarakat Sa'dan Balusu dalam mendapatkan warisan orang tua, dan bukan hanya karena adanya hak tetapi ada kewajiban-kewajiban yang membatasinya, makanya seorang anak sah berhak atas warisan orang tuanya setelah memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan. Pada garis besarnya kewajiban yang merupakan pengabdian, yaitu :

- a. Pengabdian dengan memelihara dan memakamkan orang tua menurut adat pemakaman orang Toraja, ini adalah salah satu hal utama yang harus dilakukan seorang anak dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya, disamping sebagai anak sah.
- b. Pengabdian kepada tongkonan dari orang tua yang meninggalkan warisan, hal ini sangat mempengaruhi harta warisan yang bersumber dari garis tongkonan karena warisan yang berasal dari tongkonan tidak lepas dari kaitannya dengan kewajiban memelihara tongkonan dari orang tua.

Penerimaan warisan dari pewaris kepada ahli warisnya tidak ada perbedaan kedudukan karena garis hubungan laki-laki/bapak ataupun garis hubungan perempuan/ibu adalah sama begitu pula kedudukan pewaris baik laki-laki maupun perempuan tetap sama, adapun ketentuan khusus bahwa kedudukan pewaris itu ditentukan oleh kewajiban dan pengabdian.

Mana' dalam masyarakat Sa'dan Balusu bukan saja hak sebagai seorang anak yang menjadi dasar untuk menerima warisan tetapi ditentukan oleh adanya kewajiban-kewajiban dan pengabdian, maka seorang penerima *mana'* yang baik harus memperhatikan 3 hal yang utama, yaitu :

1. Soal pengabdian kepada tongkonan orang tua.
2. Pengabdian kepada orang tua pada masa hidupnya dan terutama pada waktu matinya atau pemakamannya.
3. Karena adanya hak atas garis keturunan menurut hubungan darah atau sebagai anak yang diakui sah.

Dan sebaliknya jika seorang anak tidak memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya sebagai seorang anak sekalipun dia anak yang sah terutama pada waktu pemakaman orang tuanya (meninggal dunia), apabila orang tuanya masih terikat adat, maka dalam pembagian warisan pun tidak mendapat sama dengan anak yang lain yang lebih banyak memberikan pengabdian kepada orang tuanya dalam segala hal terutama pada pemakaman orang tuanya.

P. Mangiwa dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa “pengurbanan kerbau dan babi pada pemakaman si peninggal warisan menentukan pula kedudukan daripada pewaris yang menerima warisan, karena keyakinan dan adat Toraja yang mengatakan bahwa :²⁶

1. Menurut kepercayaan aluk todolo semua hewan atau semua pengurbanan harta benda mempunyai Roh seperti manusia dan roh-roh itu akan menjadi bekal untuk mengantarkan si peninggal warisan menuju alam baka yang disebut *Puya*.
2. Sebagai dasar dan pangkal pembagian harta warisan dari seorang pewaris kepada semua turunannya dan pewaris-pewarisnya.
3. Untuk menjamin martabat dari seluruh turunannya karena telah membuktikan kepribadian berkurban bersosial kepada masyarakat menurut adat Toraja.

²⁷Dalam wawancara penulis dengan Y. Gau' yang juga merupakan salah satu tokoh adat di Sa'dan Balusu, dikatakan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan adalah anak yang sah dan berhak untuk menerima warisan dari orang tuanya, tetapi anak yang sah dalam masyarakat Sa'dan Balusu dibedakan menjadi 2, yaitu *anak Dadian anak Tana'* dan *anak Dadian bukan anak Tana'*.

²⁶ P. Mangiwa, Wawancara, 6 April 2016

²⁷ Y. Gau', Wawancara, 6 April 2016

Anak Dadian anak Tana' adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut adat karena orang tuanya kedudukannya sama tana'. Anak ini adalah anak yang sah yang berhak menerima warisan dari orang tuanya tetapi perlu dipastikan walaupun anak ini adalah anak yang sah tetapi dia harus memenuhi syarat sebagai penerima warisan yaitu bukan saja sebagai anak yang sah tetapi dia juga harus memenuhi 2 syarat lainnya, yaitu mengabdikan pada tongkonan orang tua dan mengabdikan kepada orang tuanya baik pada masa hidupnya dan pada waktu matinya atau pemakamannya, setelah memenuhi hal itulah baru seorang anak yang sah berhak untuk menggunakan dan menikmati harta pusaka tinggi serta mendapatkan warisan harta pusaka rendah dari kedua orang tuanya.

Sedangkan *anak dadian anak bukan tana'* adalah anak yang kedua orang tuanya tidak sama tana', seorang bangsawan mengawini seorang hamba yang melahirkan seorang anak yang dinamakan *anak Sali* (yang berasal dari kaum bangsawan adalah seorang laki-laki), dalam hal ini *anak Sali* harus memenuhi syarat untuk mewaris yaitu dia harus mengabdikan pada tongkonan orang tuanya dan mengabdikan pada orang tuanya pada masa hidupnya dan pada waktu pemakamannya. Barulah anak Sali dapat Menggunakan dan menikmati harta pusaka tinggi serta menerima warisan berupa harta pusaka rendah dari orang tuanya. Tetapi beda halnya dengan anak sah yang lahir dari perkawinan yang kedudukan tana'nya sama, dalam menerima mana' *anak Sali* mendapat lebih sedikit *mana'* dari *anak dadian anak tana'* atau pembagian ditentukan oleh saudara anak

tana'. Sedangkan pada anak yang lahir dari perkawinan ibu yang berasal dari tana' bulaan dan ayah yang berasal dari tana' kua-kua. Anak ini tetap dikatakan anak sah dari kedua orang tuanya, anak ini dapat menerima mana' tetapi hanya berupa mana' ba'gi (harta pusaka rendah), dia tidak dapat menggunakan atau pun menikmati mana' disiossoi karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui oleh adat maupun keluarganya.

Pada harta pusaka tinggi (mana' disiossoi) dalam masyarakat Sa'dan balusu cara pembagiannya lebih kepada sistem pewarisan kolektif misalnya rumah tongkonan semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya dapat menikmati. Sedangkan pada harta pusaka rendah (mana' ba'gi), penguasaan dan kepemilikannya dapat dibagi menurut hak dan kepentingan para warisnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pada umumnya menurut hukum adat masyarakat di Sa'dan Balusu perkawinan antara tana' bulaan dengan tana' kua-kua itu dilarang, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, karena keadaan zaman yang berubah membawa perubahan kepada sebagian masyarakat yang membuat masyarakat menyimpang dari norma-norma yang telah berlaku. Seorang perempuan dari tana' bulaan tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki dari tana' kua-kua, jika itu terjadi maka perempuan akan mendapatkan sangsi adat yang dikatakan *Unteka' Palanduan* yaitu pemutusan hubungan dengan keluarganya, sedangkan jika laki-laki dari tana' bulaan menikah dengan perempuan dari tana' kua-kua, hal ini dimungkinkan terjadi tetapi mereka harus membayar denda adat berupa kerbau sebanyak 12 ekor agar dapat kawin. Tetapi perlu diketahui bahwa denda itu hanya untuk memungkinkan perempuan kawin dengan laki-laki dari tana' bulaan. Denda itu tidak membuat perempuan berubah statusnya menjadi bangsawan, dia akan tetap berstatus sebagai golongan hamba.
2. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan orang tua tana' bulaan dengan tana' kua-kua dalam masyarakat Sa'dan Balusu, yaitu jika

yang berasal dari *tana' bulaan* adalah laki-laki dan *tana' kua-kua* adalah perempuan maka anak itu dikatakan *anak Sali*, dia berhak menerima warisan dari orang tuanya dengan syarat bahwa anak itu harus memenuhi syarat sebagai penerima warisan yaitu bahwa anak itu harus mengabdikan kepada tongkonan orang tuanya dan mengabdikan kepada orang tua pada masa hidupnya dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak pada waktu orang tuanya meninggal yaitu mengurbankan kerbau dan babi. Setelah itu barulah anak dapat menggunakan dan menikmati harta pusaka tinggi (*mana' disiosoi*) dan menerima warisan berupa harta pusaka rendah (*mana' bagi*) dari orang tuanya. Bukan itu saja dalam menerima warisan *anak Sali* menerima warisan lebih sedikit dari *anak dadian anak tana'* (anak yang lahir dari perkawinan orang tua sama *tana'*) atau pembagian ditentukan oleh saudaranya *anak tana'*, sebaliknya jika perempuan berasal dari *tana' bulaan* dan laki-laki dari *tana' kua-kua* maka, anak dari hasil perkawinan tersebut hanya menerima warisan berupa harta pusaka rendah (*mana' ba'gi*) dari orang tuanya dan tidak dapat menggunakan mau pun menikmati harta pusaka tinggi (*mana' disiosoi*) karena perkawinan kedua orang tuanya tidak diakui oleh adat maupun keluarganya.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Toraja Utara khususnya masyarakat Sa'dan Balusu tetap mempertahankan adat istiadat yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam wilayahnya. Akan tetapi tetap harus memperhatikan dan menghargai strata sosial yang ada di dalamnya agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan baik.
2. Sebaiknya keluarga besar/orang tua di Sa'dan Balusu memperlakukan adat istiadat yang berlaku dalam daerahnya kepada anak cucunya sejak mereka mulai beranjak dewasa untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR ISTILAH

- ***Aluk Todolo*** adalah (aluk= kepercayaan, To = Orang, Dolo = Dulu) kepercayaan leluhur masyarakat Toraja dimana kepercayaan ini tidak mengenal adanya neraka dan percaya kepada dewa yang maha kuasa serta menganggap bahwa orang tua adalah wakil Tuhan di Dunia, sejahat apapun orang tua mereka saat di dunia maka pada saat meninggal arwah orang tua merekalah yang akan menjadi perantara doa-doa kepada dewa mereka.
- ***Tana' Bulaan*** adalah kasta yang menjabat ketua/pemimpin dan anggota pemerintahan adat.
- ***Tana' Bassi*** adalah Kasta yang menjabat jabatan pembantu atau anggota pemerintahan adat
- ***Tana' Karurung*** adalah kasta yang menjabat jabatan petugas/pembina aluk todolo untuk urusan aluk patuoan dan aluk tananan.
- ***Tana' kua-kua*** adalah kasta yang menjabat jabatan petugas/pengatur pemakaman atau kematian dan sebagai pengabdikan kepada kasta tana' bulaan dan tana' bassi.
- ***Rampanan Kapa'*** adalah Perkawinan dalam adat Toraja.
- ***Tongkonan*** adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkon artinya menduduki atau tempat duduk. Tongkonan dikatakan sebagai tempat duduk karena merupakan tempat berkumpulnya para bangsawan

Toraja. Mereka biasanya duduk dalam tongkonan untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah adat.

- ***Tau*** adalah manusia dalam bahasa Toraja.
- ***Rambu tuka'*** adalah (rambu=asap, tuka'=naik) yang biasa juga disebut aluk rampe matallo (aluk=upacara, rampe=bagian, matallo=tempat matahari terbit) yang artinya upacara kegembiraan (Syukuran) atau upacara kesenangan yang dilaksanakan pada pagi hari.
- ***Rambu solo'*** adalah (rambu=asap, solo'=turun) yang biasa juga disebut aluk rampe matampu' (matampu'=tempat matahari terbenam) yang berarti upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore hari.
- ***Ada'*** adalah adat/pemerintah adat.
- ***Unteka' palanduan*** adalah (unteka'=memanjati, palanduan=tapaan kayu bakar) pemutusan hubungan dengan keluarga.
- ***Mana'*** adalah warisan/harta.
- ***Mana' disiossoi*** adalah harta yang tidak dapat dibagi penguasaan dan kepemilikannya, dan merupakan harta pusaka tinggi yang berasal dari leluhur.
- ***Mana' ba'gi*** adalah harta yang berasal dari lapisan diatas ayah dan ibu juga harta pencarian orang tua yang dapat dibagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya menurut hak dan kepentingan ahli warisnya.
- ***Puya*** adalah Dunia orang mati menurut masyarakat Toraja.

- ***Anak dadian anak tana'*** adalah anak sah yang lahir dari perkawinan orang tua yang kedudukan tana'nya sama.
- ***Anak dadian bukan anak tana' (anak Sali)*** adalah anak sah yang lahir dari perkawinan orang tua yang kedudukan tana'nya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soekanto Soejono, 2005, *hukum adat indonesia*, Jakarta:rajawali pers.
- Tangdilintin L.T, 1974, *Sejarah Kebudayaan Toraja*, Tana Toraja:Yayasan Lepongan Bulan.
- Wiranaka I gede A.B., 2005, *hukum adat indonesia*, Bandung:Citra aditya bakti.
- SOEPOMO. R., 1967, "*Bab-bab tentang hukum adat*", Penerbitan universitas.
- PRODJODIKORO WIRYONO., 1976, "*Hukum Warisan Di Indonesia*" Bandung:Sumur Bandung, cetakan kelima.
- Hadikusuma Hilman H., 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- LONTAAN J.U., *Sejarah hukum adat*, Jakarta:PT. Bumirestu.
- SUBEKTI, 1978, *Penerapan hukum adat*, Laporan penataran FH, UGM. I-II.
- Wulansari Dewi C., 2010, *Hukum adat Indonesia*, Bandung:PT. Refika Aditama.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung:Alfabeta.
- Wignjodipoero Soerojo, 1983, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta:PT. Toko Gunung Agung.

Website :

- <http://rizqiapriazi.tumblr.com/post/35059998092/tugas-softskill-ilmu-sosial-dasar-manusia-sebagai-makhluk-sosial.html> diakses pada 16 Januari 2016 pukul 09.00 WITA.
- <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat.html> diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 09.15 WITA.

*<https://justice94.wordpress.com/pluralisme-hukum-warisan-di-Indonesia.com>
diakses pada tanggal 16 Januari 2016 pukul 09.20 WITA.*

*<http://serlania.blogspot.com/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html> diakses
tanggal 16 Januari 2016 pukul 14.00 WITA.*

LAMPIRAN